

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Nova Rustiyani¹⁾, Irene Sukma Lestari Barus²⁾

¹⁾²⁾ Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama Bandung

¹⁾ nova.rustiyani@widyatama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun anggaran 2012 hingga 2019. Metode pilihan adalah penyelidikan ilmiah dengan menggunakan data sekunder (data time series) yang dikumpulkan selama delapan tahun di satu lokasi. Eviews Versi 10 berfungsi sebagai alat pengujian untuk analisis regresi error correction model (ECM). Temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hanya Dana Perimbangan yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Barat masih bergantung dengan mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengelola daerahnya.

Kata kunci: PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan

Abstract

This study will examine the effect of Local Original Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure on the financial performance of the West Bandung Regency Regional Government from fiscal year 2012 to 2019. The method of choice is a scientific investigation using secondary data (time series data) collected over eight years in one location. Eviews Version 10 serves as a testing tool for error correction model (ECM) regression analysis. The findings of this study illustrate how Regional Original Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure together affect Financial Performance and partially Regional Original Revenue does not have a significant effect on Financial Performance, Balancing Fund has a significant positive effect on Financial Performance, and Capital Expenditure does not have a significant effect on Financial Performance. The results of this study explain that only the Balancing Fund affects Financial Performance, which means that the West Regency local government still relies on funds from the Central Government to manage its area.

Keywords: PAD (Regional Original Income), Balance Fund, Capital Expenditure, Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Istilah "otonomi daerah" digunakan untuk menggambarkan proses dimana kekuasaan didistribusikan dari federal ke tingkat negara bagian atau lokal. Dengan otonomi geografis yang luas, pemerintah daerah bebas mengambil keputusan tentang pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Anggaran daerah menentukan berapa banyak uang yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan oleh setiap pemerintah daerah, dan setiap tingkat pemerintahan memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan uang daerah.

Peraturan daerah mewajibkan pemerintah daerah dan DPRD untuk bertemu dan merundingkan rencana keuangan tahunan yang dikenal dengan APBD. Rencana ini diamanatkan oleh Peraturan

Pemerintah 58 Tahun 2005. APBD mencakup semua uang yang dihasilkan, dibelanjakan, dan dibiayai dalam suatu wilayah tertentu. Dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima dan mendorong pembangunan ekonomi daerah, APBD berfungsi sebagai anggaran dan rencana pelaksanaan, serta alat legislatif dan panduan untuk kebijakan publik.

Dua elemen keberhasilan keuangan diperlukan untuk otoritas daerah untuk memperbaiki masa lalu. Pertama-tama, daerah harus diberikan kendali atas pendanaan daerah, dengan potensi untuk menaikkan pajak sebagai sumber utama kekuasaan mereka (Desentralisasi Fiskal). Kedua, mereka harus mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif. Untuk mencapai kedaulatan daerah, dana daerah harus lebih bertanggung jawab dan terbuka. Kedua komponen ini dapat disebut sebagai Reformasi Keuangan atau Reformasi Pembiayaan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan segala kegiatan operasional atau kegiatan daerah berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya uang masing-masing daerah (Mahmudi, 2010).

Menurut Mardiasmo (2009) Nilai uang dievaluasi dalam hal ekonomi, kecepatan, dan kemanjuran saat menilai kinerja. Persentase kurang dari 1 atau kurang dari 100% dianggap efisien dalam pengumpulan pajak untuk pemerintah kota. Metrik efisiensi adalah bagian dari penilaian kinerja. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai output maksimum dari sekumpulan input yang diberikan dan sebaliknya. Mardiasmo (2009) mengklaim bahwa formula efisiensi digunakan dengan ukuran proksi kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota, dan pengukuran didasarkan pada rasio output terhadap input.

Tabel 1.1

Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2019

No	Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio	%
1	2012	1.501,19	1.423,86	1,054	105,431
2	2013	1.680,10	1.671,36	1,005	100,523
3	2014	1.868,26	1.911,84	0,977	97,721
4	2015	2.077,33	2.154,21	0,964	96,431
5	2016	2.313,02	2.242,25	1,032	103,156
6	2017	2.581,92	2.722,71	0,948	94,829
7	2018	2.643,90	2.601,96	1,016	101,612
8	2019	2.940,99	2.902,84	1,013	101,314

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah dalam miliaran rupiah)

Seperti terlihat pada grafik di atas, keberhasilan keuangan Pemda KBB pada tahun 2014, 2015, dan 2017 termasuk dalam kelompok kurang efektif dengan rasio efisiensi masing-masing sebesar 97,721%, 96,431%, dan 94,829. Sebaliknya, mereka berada pada kelompok boros pada tahun 2012, 2013, 2016, 2018, dan 2019 (masing-masing 105,431%, 100,523%, 103,156%, 101,612%, dan 101,314%). Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bandung Barat dapat dibandingkan dengan membandingkan input dan output pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan dan pelayanan publik. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin kurang efektif pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten. Yang artinya Terlalu banyak masukan diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan, yang bertentangan dengan prinsip efisiensi ekonomi. Jika suatu tindakan menghasilkan manfaat positif dengan sedikit pengorbanan finansial, itu dikatakan efisien.

Bastian (2001: 110) Menurut keterangan tersebut, pendapatan asli daerah terdiri dari pos pajak daerah dan retribusi daerah, golongan PNBPN yang meliputi pendapatan usaha daerah, pos pendapatan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Idealnya, semua pengeluaran daerah harus ditanggung oleh PAD agar daerah benar-benar berdaulat dan terpisah dari pemerintah

pusat. Jika PAD suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan belanja daerah secara signifikan, maka dapat dikatakan cukup maju dan sejahtera secara ekonomi, begitu pula sebaliknya. Dari hasil perbandingan PAD dengan Total Penerimaan daerah diketahui kemampuan keuangan di Pemda Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori Rendah sekali karena capaian yang paling tinggi di dapat pada tahun 2017 dengan rasio 22,401% dan dalam kategori pola hubungan yang instruktif. Dan ini bertentangan dengan gagasan dan tujuan otonomi daerah, yang menuntut kemandirian yang lebih besar bagi pemerintah kota.

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 33 Tahun 2004 disalurkan dari pendapatan APBN ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pelimpahan. Karena tingkat kebebasan keuangan daerah yang rendah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sangat bergantung pada dana APBN yang masih tinggi meskipun tuntutan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran mereka di era otonomi semakin meningkat.

Dalam Mardiasmo (2009: 67) Investasi modal didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang dengan meningkatkan aset keuangannya dan, pada gilirannya, anggaran rutinnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik yang memberikan manfaat langsung dan instan kepada masyarakat, seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan pusat transportasi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mengelola pengeluaran tersebut sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perekonomian daerah dapat ditopang jika alokasi belanja modal lebih besar dialokasikan ke aliran pendapatan daerah. Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada sumber pendapatan awal daerah. Belanja modal yang rendah, di sisi lain, akan menyebabkan kegagalan banyak proyek pemerintah, menurunkan persetujuan publik terhadap pemerintah. Selain itu, jika biaya moneter meningkat, program dan upaya pemerintah akan diperkenalkan. Meskipun pada tahun 2019 tumbuh moderat sebesar 1%, rasio belanja modal terhadap belanja daerah terkadang menurun. Pada tahun 2018, belanja modal mencapai 10% dari belanja daerah, porsi terendah sejak tahun 2012 sebesar 23,40%. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010–2014, yang menunjukkan bahwa total belanja modal yang diverifikasi dalam APBD minimal 29%. Ketidakpuasan publik terhadap infrastruktur dan fasilitas publik merupakan akibat langsung dari alokasi belanja modal yang buruk, yang pada gilirannya mengurangi ketersediaan layanan publik.

Sesuai yang telah diuraikan di Pemda Kabupaten Bandung Barat lebih besar menggunakan dana dari dana perimbangan untuk membiayai pengeluaran belanja dibandingkan dana dari pendapatan asli daerahnya, hal ini lebih dikenal dengan fenomena flypaper effect karena ketidakberdayaan pemerintah daerah tersebut menghasilkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah. penulis menduga fenomena tersebut disebabkan karena teori The Bureaucratic model.

Informasi pendapatan awal daerah dan pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan bahwa:



Gambar 1.1 Pendapatan dan Pengeluaran Pemda KBB

Sumber: Data Yang Diolah

Menurut gambar dapat dijelaskan bahwa terdapat besar sekali perbedaan antara pendapatan dengan pengeluaran, pendapatan asli daerah rendah sedangkan pengeluaran atau belanja daerah tinggi sehingga penulis menduga seperti teori The Bureaucratic model bahwa lebih mudah para birokrat memaksimalkan anggaran terhadap pusat dibandingkan menaikkan pajak untuk menaikkan pendapatan asli daerahnya dan mengakibatkan daerah belum bisa mandiri masih bergantung terhadap pusat yang menyebabkannya flypaper effect.

Andjarwati et al. (2021) mendasarkan pembahasan dampak PAD terhadap kinerja keuangan Pemda pada penelitiannya sendiri yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, namun Awwaliyah et al. (2019) menemukan bahwa PAD memang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Sementara penelitian Suambara & Darmayanti (2020) mengungkapkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kinerja keuangan Pemda, riset Mtd et al. (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh kepada kinerja keuangan Pemda.

Berbeda dengan pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemda yang ditunjukkan oleh riset Yuliansyah et al. (2020), penelitian Hariani & Febriyastuti (2020) tentang dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemda menyimpulkan terdapat tidak berdampak signifikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis memfokuskan penelitiannya pada satu kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan dengan judul ini di Kabupaten Bandung Barat, menggunakan periode laporan realitas anggaran selama 8 tahun, peneliti menambahkan variabel independen, penelitian terdahulu masih sedikit variabelnya sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori The Bureaucratic Model

Menurut rangkuman Schwallie (1986) dalam Sagbas & Saruc (2004), terdapat dua teori besar Economic fallacy dan bureaucracy mode dari sejumlah kajian tentang asal mula Flypaper Effect, keduanya sering digunakan. Menurut Armawaddin et al. (2017) tentang model birokrasi, efek Flypaper Effect dihasilkan dari kecenderungan pejabat (atau anggota parlemen lokal) untuk menghabiskan uang sebanyak mungkin daripada mengemis kenaikan pajak (Sagbas & Saruc, 2004).

Kekuasaan dan pengetahuan pejabat atau administrasi kota dalam kaitannya dengan pembayaran dan pengeluaran pemerintah juga dapat berdampak pada kertas terbang dalam situasi ini. Model birokrasi secara diam-diam mendukung Flypaper Effect karena pejabat bebas membelanjakan transfer (hibah) daripada menaikkan pajak karena kenaikan pajak dianggap sebagai program kontroversial oleh pembuat undang-undang atau penduduk setempat.

Dikutip dari penelitian Arwati & Ruth (2015) Dampak Flypaper Effect terjadi, seperti dijelaskan oleh Listiorini (2012: 2), ketika pemerintah daerah bereaksi terhadap peningkatan belanja dengan redistribusi uang dari DAU dan DAK ke PAD untuk mendukung belanja daerah (pendapatan asli daerah).

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim (2008: 35) Kegiatan keuangan (ekonomi) dari organisasi pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau daerah) diidentifikasi, diukur, dicatat, dan dilaporkan dalam akuntansi pemerintah untuk tujuan memberikan informasi kepada pihak di luar pemerintah yang memberikan nasihat ekonomi kepada pemerintah daerah.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2012: 2) Dalam membahas kinerja keuangan suatu pemda, salah satunya mengacu pada temuan atau evaluasi suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan prinsip-prinsip penerapan keuangan dalam menjalankan usaha. Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah kota dapat diukur melalui analisis pendapatan daerah. Penulis penelitian ini menggunakan rasio efisiensi uang

sebagai metrik pilihan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menunjukkan selisih antara perolehan pendapatan dengan pendapatan aktual yang diterima. Proporsi kurang dari 100% menunjukkan pengumpulan pendapatan yang efisien oleh otoritas kota..

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Ketika Halim & Kusufi (2014: 101) berbicara tentang PAD, maksudnya semua pendapatan yang diperoleh di suatu daerah yang berakar pada perekonomian daerah tersebut. Menurut Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang dihimpun oleh daerah sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasir, 2019: 18).

Antari & Sedana (2018) mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat menimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andjarwati et al. (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian oleh Antari & Sedana (2018) hasil dalam penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dimaksud masukan dana dari APBN untuk mencapai keseimbangan diantara pemerintah federal dengan pemda dan antara pemerintah daerah lainnya untuk pembiayaan daerah demi sukseskannya desentralisasi (Darise 2008: 137), yang artinya dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Djaenuri (2012) mengatakan dana perimbangan digunakan untuk otonomi daerah khususnya untuk mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suambara & Darmayanti (2020) menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. penelitian yang dilakukan oleh Mtd et al. (2022) yang membahas pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan hasil dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

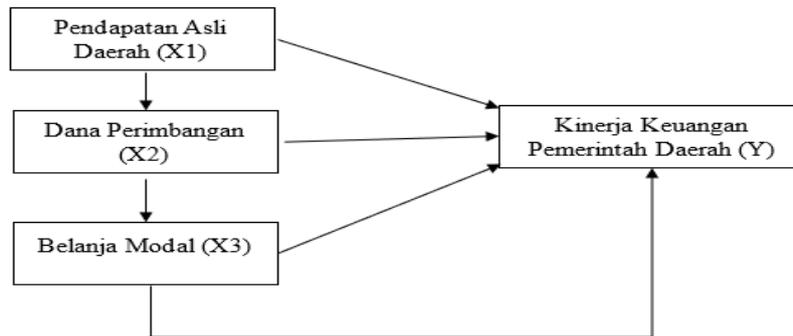
2.6 Belanja Modal

Mardiasmo (2009: 67) "Belanja Modal adalah pengeluaran yang akan meningkatkan anggaran normal untuk biaya operasional dan pemeliharaan karena keuntungannya biasanya bertahan lebih dari satu tahun anggaran."

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan adanya pembangunan infrastruktur dalam pelayanan masyarakat, hal ini sejalan dengan Andirfa et al. (2016) yang menyatakan bahwa infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktifitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah et al. (2020) mengungkapkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. penelitian yang dilakukan oleh Hariani & Febriyastuti (2020) yang membahas pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan ulasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah

- H1 : PAD mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan
- H2 : Dana perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- H3 : Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- H4 : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Riset matematika atau kuantitatif digunakan dalam riset ini, dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://djpk.kemenkeu.go.id/>) digunakan sebagai sumber data untuk data sekunder dengan data time series. Total 8 tahun, 1 distrik. Menggunakan utilitas uji Eviews Versi 10 untuk Windows, data diperiksa menggunakan teknik analisis regresi error correction model (ECM).

Menurut Ajija et al. (2011: 133) Saat berhadapan dengan data deret waktu yang tidak stasioner, model ECM adalah pilihan terbaik. ECM digunakan untuk menampilkan perilaku model pada jarak dekat dan jauh. Syarat utama ECM (Error Correction Model) adalah harus ada hubungan kointegrasi antar variabel penyusunnya. Dengan menggunakan model ini, kita dapat menyesuaikan persamaan regresi antara variabel non-stasioner untuk memastikan bahwa mereka kembali ke keadaan stabilnya.

3.1 Instrumen Penelitian

PAD, dana perimbangan, dan belanja modal menjadi faktor independen penelitian, dan kinerja keuangan Pemda menjadi variabel dependen penelitian.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2014:101).	Rasio PAD diukur dengan melihat nilai PAD yang telah disajikan dalam laporan Realisasi APBD kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Marizka, 2013): $PAD = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
2	Dana Perimbangan (X2)	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darius, 2008:137).	Rasio Dana Perimbangan diukur, dengan melihat nilai Dana Perimbangan yang telah disajikan dalam laporan Realisasi APBD Provinsi yang bersangkutan, dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Marizka, 2013): $DP = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
3	Belanja Modal (X3)	Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya (Mardiasmo, 2009: 67).	Rasio Belanja Modal diukur dengan menggunakan rumus (Tahar dan Suwandi, 2015): $BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
4	Kinerja Keuangan (Rasio Efisiensi) (Y)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Menurut Mardiasmo (2013): $REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

4. PEMBAHASAN

4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Date: 01/31/23
Time: 20:54
Sample: 2012 2019

	KK	PAD	DANPER	BM
Mean	1.001125	0.152500	0.638000	0.163125
Median	1.009000	0.154000	0.651500	0.168000
Maximum	1.054000	0.224000	0.706000	0.234000
Minimum	0.948000	0.096000	0.538000	0.100000
Std. Dev.	0.035675	0.040873	0.054639	0.042549
Skewness	-0.110529	0.307143	-0.661792	0.036913
Kurtosis	1.914890	2.346732	2.473750	2.347501
Jarque-Bera	0.408777	0.268471	0.676271	0.143735
Probability	0.815146	0.874384	0.713089	0.930654
Sum	8.009000	1.220000	5.104000	1.305000
Sum Sq. Dev.	0.008909	0.011694	0.020898	0.012673
Observations	8	8	8	8

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Hasil dari statistik deskriptif penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.1:

1. Kisaran variabel pendapatan asli daerah adalah dari 0,096000 sampai dengan 0,224000, dengan mean 0,152500 dan std deviasi 0,040873.
2. Kisaran variabel dana perimbangan adalah dari 0,538000 hingga 0,706000, dengan rata-rata 0,638000 dan std deviasi 0,054639.
3. Variabel belanja modal berkisar dari terendah 0,100000 hingga tertinggi 0,234000, dengan mean 0,163125 dan std deviasi 0,04255.
4. Kisaran nilai variabel kinerja adalah 0,948000 sampai dengan 1,054000, dengan mean 1,001125 dan std deviasi 0,035675.

4.2. Hasil Tes Prasyarat

1. Uji Stasioner

Tabel 4.2 Hasil Uji Stasioner Data Tingkat Level

Intermediate ADF test results UNTITLED

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
KK	0.0314	0	1	7
PAD	0.4543	0	1	7
DANPER	0.1830	0	1	7
BM	0.9057	1	1	6

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Didalam tabel diatas dapat dilihat variable PAD , DANPER dan BM nilai probabilitasnya lebih dari nilai kritis 0,05(5%) sehingga ketiga variable tersebut tidak stasioner di tingkat level.

Tabel 4.3 Hasil Uji stasioner ADF (tingkat first defference)

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(KK)	0.0282	0	0	6
D(PAD)	0.0720	0	0	6
D(DANPER)	0.0915	0	0	6
D(BM)	0.0148	0	0	6

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat variable PAD dan DANPER nilai probabilitasnya lebih dari nilai kritis 0,05(5%) sehingga kedua variable tersebut tidak stasioner di tingkat first difference.

Tabel 4.4 Hasil Uji Stasioner ADF (tingkat second difference)

Intermediate ADF test results D(UNTITLED,2)

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(KK,2)	0.0102	0	0	5
D(PAD,2)	0.0294	0	0	5
D(DANPER,2)	0.0479	0	0	5
D(BM,2)	0.0210	0	0	5

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat seluruh variable yaitu PAD, DANPER, BM dan KK nilai probabilitasnya kurang dari nilai kritis 0,05(5%) sehingga seluruh variable tersebut telah stasioner di tingkat second difference. Setelah itu akan dilakukan uji kointegrasi.

2. Uji Kointegrasi

Tabel 4.5 Hasil Uji Akar Unit Data Residu

Null Hypothesis: ECT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic- based on SIC, maxlag=1)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.296353	0.0017
Test critical values:		
1% level	-5.119808	
5% level	-3.519595	
10% level	-2.898418	

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Tabel diatas menggambarkan nilai peluang variabel ECT kurang dari 0,05. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel ECT stabil pada level dan variabel PAD, DANPER, BM, dan KK terkointegrasi. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam model permutasi memiliki kointegrasi, atau hubungan jangka panjang.

4.3 Hasil Regresi Jangka Panjang

Tabel 4.6 Regresi Jangka Panjang

Dependent Variable: KK
Method: Least Squares
Date: 01/31/23 Time: 21:11
Sample: 2012 2019
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.843981	0.084524	9.985089	0.0008
PAD	-0.749574	0.189513	-3.955270	0.0167
DANPER	0.497857	0.105099	4.737052	0.0091
BM	-0.283092	0.181315	-1.561331	0.1935

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Persamaan analisis regresi jangka panjang adalah sebagai berikut:

$$KK = 0,843981 - 0,749574PAD_t + 0,497857DANPER_t - 0,283092BM_t + ut$$

Berdasarkan estimasi diatas, dalam regresi jangka panjang sebagai berikut :

1. Nilai 0,843981 adalah angka tetap. Hal ini menunjukkan bahwa jika faktor PAD, DANPER, dan BM semuanya setara dengan nol, maka KK akan menjadi 0,843981.
2. Paritas Daya Beli Lokal (PAD) menunjukkan nilai -0.749574. Jika estimasi nilai regresi negatif, maka trennya berlawanan arah. Dengan meningkatnya PAD sebesar 1 satuan, maka KK berkurang sebesar 0,749574 satuan. Jika semua faktor lain tetap, penurunan satu unit pendapatan asli daerah (PAD) akan menyebabkan peningkatan pencapaian keuangan (KK).
3. Nilai koefisien Dana Pemantapan (DANPER) sebesar 0,497857. Statistik regresi positif menunjukkan pergeseran yang hanya terjadi dalam satu arah. Hal ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel dana penyesuaian, keberhasilan keuangan (KK) akan meningkat sebesar 0,497857 unit (Danper). Sebaliknya, untuk setiap penurunan satu unit pada variabel dana penyesuaian, keberhasilan keuangan (KK) akan berkurang sebesar 0,497857 unit jika variabel independen lainnya tetap (DanPer).
4. Indeks belanja modal adalah -0,283092. (BM). Estimasi regresi dengan nilai negatif menunjukkan perubahan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan satu unit pada variabel BM untuk belanja modal akan menghasilkan penurunan sebesar 0,283092 unit pada variabel KK untuk pencapaian finansial. Sebaliknya, penurunan belanja modal (BM) akan mendongkrak

kinerja keuangan (KK) sebesar 0,283092 satuan, dengan asumsi tidak ada pergeseran faktor independen lainnya.

4.4. Hasil Regresi Jangka Pendek (ECM)

Tabel 4.7 Hasil Uji Model ECM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-0.399931	1.019892	-0.392130	0.0328
C	0.017042	0.013218	1.289257	0.3263

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Model ECM dapat dikatakan valid berdasarkan koefisien ECT negatif Tabel 4.7 dan nilai prob signifikan $0,0328 < 0,05(5\%)$. Selain itu, kami melakukan studi regresi jangka pendek (ECM).

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Jangka Pendek (ECM)

Dependent Variable: D(KK)
Method: Least Squares
Date: 01/31/23 Time: 23:05
Sample (adjusted): 2013 2019
Included observations: 7 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PAD)	-1.128828	0.350174	-3.223622	0.0842
D(DANPER)	0.536745	0.074895	7.166684	0.0189
D(BM)	0.411514	0.401488	1.024976	0.4132
ECT(-1)	-0.399931	1.019892	-0.392130	0.0328
C	0.017042	0.013218	1.289257	0.3263

R-squared	0.989754	Mean dependent var	-0.005857
Adjusted R-squared	0.989263	S.D. dependent var	0.058902
S.E. of regression	0.009976	Akaike info criterion	-6.201454
Sum squared resid	0.000199	Schwarz criterion	-6.240089
Log likelihood	26.70509	Hannan-Quinn criter.	-6.678983
F-statistic	48.30077	Durbin-Watson stat	1.935380
Prob(F-statistic)	0.020387		

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Persamaan untuk periode singkat analisis regresi terlihat seperti ini:

$$KK = 0,017042 - 1,128828PAD_t + 0,536745DANPER_t + 0,411514BM_t - 0,399931ECT(-1) + ut$$

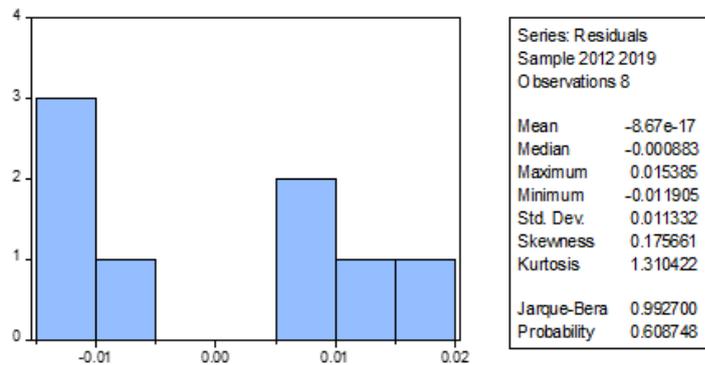
Berdasarkan estimasi diatas, dalam regresi jangka pendek sebagai berikut:

1. Angka 0,017042 adalah angka tetap. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD, DANPER, dan BM semuanya setara dengan nol, maka KK akan menjadi 0,017042.
2. Nilai ORI Area PAD adalah -1.128828. Jika estimasi nilai regresi negatif, maka trennya berlawanan arah. Artinya terdapat korelasi negatif antara kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kesejahteraan ekonomi (KK), dengan penurunan sebesar 1,128828 satuan untuk setiap satuan PAD. Seperti pada ilustrasi sebelumnya, jika semua faktor independen lainnya tetap sama, maka penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar satu unit akan meningkatkan keberhasilan keuangan (KK) dengan rasio 1,128828.
3. Indeks Keseimbangan Uang (DANPER) adalah 0,536745. Statistik regresi positif menunjukkan pergeseran yang hanya terjadi dalam satu arah. Untuk setiap satuan kenaikan variabel dana perimbangan, maka keberhasilan keuangan (KK) akan naik sebesar 0,536745 satuan, sebagai ilustrasi (Danper). Sebaliknya, untuk setiap penurunan satu unit pada variabel dana penyesuaian, keberhasilan keuangan (KK) akan berkurang sebesar 0,536745 unit jika variabel independen lainnya tetap (DanPer).
4. Koefisien belanja modal (BM) sebesar 0,411514. Statistik regresi positif menunjukkan pergeseran yang hanya terjadi dalam satu arah. Sebagai gambaran, variabel keberhasilan

keuangan (KK) akan naik sebesar 0,411514 satuan setiap kali variabel belanja modal (BM) naik sebesar satu satuan. Sebaliknya, untuk setiap penurunan satu unit pada variabel Beban Modal (BM), Keberhasilan Finansial (KK) jika variabel independen lainnya dipertahankan tetap akan berkurang sebesar 0,411514 unit.

4.5. Hasil Tes Asumsi Klasik

1. Uji Normalisasi



Gambar 4.1 Uji Normalisasi

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Data yang dipermasalahkan berdistribusi normal, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa nilai JB, 0,992700, lebih tinggi dari 5% (atau 0,05) dengan peluang 0,0608748 (lihat Gambar 4.1).

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.9 Uji Heteroskedistisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-s tatic	1.238443	Prob. F(3,4)	0.4066
Obs*R-squared	3.849185	Prob. Chi-Square(3)	0.2782
Scaled explained SS	0.418888	Prob. Chi-Square(3)	0.9387

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Tabel 4.9 menggambarkan nilai peluang Chi-Square sebesar $0,2782 > 0,05$, menunjukkan bahwa data yang bersangkutan homoskedastisitas dan tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 01/31/23 Time: 23:10			
Sample: 2012 2019			
Included observations: 7			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(PAD)	0.122622	10.71941	9.417592
D(DANPER)	0.005609	2.178043	2.168416
D(BM)	0.161191	9.784412	6.507825
ECT(-1)	1.040180	6.921267	6.567847
C	0.000175	12.28955	NA

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Berdasarkan tabel 4.10, data VIF menunjukkan tidak ada angka VIF yang menunjukkan >10, sehingga menunjukkan multikolinearitas tidak menjadi masalah dalam penelitian ini dan memungkinkan untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.11 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.196594	Prob. F(2,1)	0.8472
Obs*R-squared	1.975549	Prob. Chi-Square(2)	0.3724

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Berdasarkan tabel di atas, yang memiliki tingkat probabilitas sekitar 0,3724 yang lebih besar dari 0,05 (5%), dapat disimpulkan bahwa model yang dimaksud bebas dari masalah autokorelasi.

4.6. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 4.12 Uji F

R-squared	0.989754	Mean dependent var	-0.005857
Adjusted R-squared	0.969263	S.D. dependent var	0.056902
S.E. of regression	0.009976	Akaike info criterion	-6.201454
Sum squared resid	0.000199	Schwarz criterion	-6.240089
Log likelihood	26.70509	Hannan-Quinn criter.	-6.678983
F-statistic	48.30077	Durbin-Watson stat	1.935360
Prob(F-statistic)	0.020387		

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Nilai peluang sebesar 0,020387, sebagaimana ditunjukkan oleh uji F pada Tabel 4.12, kurang dari taraf signifikansi 5%. Hasil ini memberikan dukungan untuk menggunakan model regresi sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah, atau untuk menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal semuanya memiliki efek menguntungkan yang substansial terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi(R²)

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.989754	Mean dependent var	-0.005857
Adjusted R-squared	0.969263	S.D. dependent var	0.056902
S.E. of regression	0.009976	Akaike info criterion	-6.201454
Sum squared resid	0.000199	Schwarz criterion	-6.240089
Log likelihood	26.70509	Hannan-Quinn criter.	-6.678983
F-statistic	48.30077	Durbin-Watson stat	1.935360
Prob(F-statistic)	0.020387		

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Menurut grafik yang disebutkan di atas, 0,988967, atau 98,9%, adalah angka R kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa 98,9% keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor Pendapatan Awal Daerah (X1), Penanganan Uang (X2), dan Pengeluaran Modal (X3) ($KD = 0,988967 \times 100\%$). (Y). Sedangkan faktor penting lainnya yang tidak diperhatikan atau tidak menjadi bagian dari penelitian ini memberikan kontribusi sisanya sebesar 1,1%.

4.8 Hasil Uji T

Tabel 4.14 Uji T

Dependent Variable: D(KK)
Method: Least Squares
Date: 01/31/23 Time: 23:05
Sample (adjusted): 2013 2019
Included observations : 7 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PAD)	-1.128828	0.350174	-3.223622	0.0842
D(DANPER)	0.536745	0.074895	7.166684	0.0189
D(BM)	0.411514	0.401486	1.024976	0.4132
ECT(-1)	-0.399931	1.019892	-0.392130	0.0328
C	0.017042	0.013218	1.289257	0.3263
R-squared	0.989754	Mean dependent var		-0.005857
Adjusted R-squared	0.969263	S.D. dependent var		0.056902
S.E. of regression	0.009976	Akaike info criterion		-8.201454
Sum squared resid	0.000199	Schwarz criterion		-8.240089
Log likelihood	26.70509	Hannan-Quinn criter.		-6.678983
F-statistic	48.30077	Durbin-Watson stat		1.935360
Prob(F-statistic)	0.020387			

Sumber: Hasil *output Eviews 10*

Dari data pada tabel 4.14 di atas terlihat bahwa:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai 0,0842 signifikan secara statistik (0,05). Karena itu, jelaslah bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ada kaitannya dengan KK.
2. Ternyata peluang variabel dana perimbangan (DANPER) kurang dari 0,05 adalah 0,0189. Yang artinya DANPER mempengaruhi KK.
3. Kemungkinan belanja modal (BM) lebih dari 0,05 adalah 0,4132. Hasil KK terbukti tidak terpengaruh oleh variabel Belanja Modal (BM)

4.9. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak yang artinya bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. menurut hasil wawancara narasumber, kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat ditingkatkan karena penerimaan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah belum dikelola secara efektif. Hasil pembahasan menguatkan angka yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bandung Barat rata-rata tidak melebihi 50% dari total pendapatan daerah antara tahun 2012 dan 2019. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk mengadopsi devolusi dan meningkatkan kinerja keuangan tidak berhasil, yang mencegah daerah mengembangkan kapasitas daerahnya untuk mencapai PAD yang lebih besar. Dalam Laporan Realitas APBN 2012-2019, pajak daerah menghasilkan PAD yang paling besar dan lebih tinggi dari retribusi daerah. Namun, pajak daerah saja tidak cukup untuk membayar hal-hal seperti pertumbuhan infrastruktur, inisiatif pemerintah, dan hal-hal lain.

Mahmudi (2009) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan temuan Andirfa et al. (2016) yang menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun berbeda

dengan Antari & Sedana (2018) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja tersebut.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H2 diterima yaitu dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bagaimana, tergantung pada keadaan setempat, kapasitas Kabupaten Bandung Barat untuk menangani atau mengumpulkan pendapatan berbeda secara signifikan. Kemampuan suatu wilayah dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti kekayaan sumber daya alam, aktivitas komersial, dan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal di sana. Untuk daerah yang kurang mampu memenuhi standar pelayanan dasar, diperlukan bantuan berupa uang penyesuaian atau bantuan wajib. Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan dapat memanfaatkan Dana Perimbangan dengan baik dan menerapkan kebijakan yang berhasil. Jika rencana itu berhasil, daerah-daerah tersebut akan mampu membayar pemerintah mereka sendiri dengan uang yang mereka kumpulkan dan hasilkan sendiri. Karena itu, dengan memanfaatkan kelebihan uang yang diberikan oleh pemerintah federal, pemda dapat meningkatkan efisiensi pendanaan pemda. Namun ada pihak yang berpendapat bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya mandiri karena ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Wilayah Metropolitan dapat menggunakan Dana Perimbangan untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah yang diinformasikan dari hasil pembicaraan yang diinformasikan data dengan narasumber. Menurut perspektif di atas, hasil ini masuk akal. Minimnya regulasi yang mengatur penyaluran DAU tahun anggaran 2012-2019 membuat instansi terkait lebih mudah menyusun anggaran. Kinerja keuangan daerah dapat meningkat akibat penyaluran dana kegiatan pembangunan daerah yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan PAD. Model birokrasi menjadi salah satu alasan terjadinya fenomena yang dikenal dengan flypaper effect, yang merupakan produk dari kecenderungan pejabat (atau pembuat undang-undang) untuk membelanjakan pembayaran dan subsidi daripada meminta kenaikan pajak. Ini juga salah satu penyebab fenomena tersebut (Sagbas & Saruc, 2004).”

Sejalan dengan Djaenuri (2012) dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Hasil ini menguatkan hipotesis dan penelitian sebelumnya oleh Badjra et al. (2017), yang menemukan bahwa DANPER berpengaruh terhadap KK. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Heryanti et al. (2019) menunjukkan bahwa DANPER tidak berpengaruh terhadap KK.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 ditolak yang artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah belum tentu lebih baik meskipun belanja modal di Kabupaten Bandung Barat meningkat, infrastruktur dibangun di sana, dan aset modal lainnya dibeli. Namun, bisa dikatakan, beban infrastruktur yang terungkap tidak serta merta menyasar program-program peningkatan keberhasilan keuangan daerah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa mendorong kebebasan keuangan daerah belum secara signifikan dipengaruhi oleh besarnya belanja konstruksi. Karena belum terfokus pada semua kegiatan yang terkait dengan investasi untuk pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas fisik yang memungkinkan, alokasi belanja modal masing-masing pemerintah daerah belum sepenuhnya termanfaatkan. Akibatnya, belum ada peningkatan keberhasilan keuangan daerah akibat belanja modal tersebut. Akibatnya, keberhasilan keuangan daerah yang diantisipasi tidak sepenuhnya terpenuhi. Menurut temuan wawancara narasumber, variabel BM tidak berpengaruh terhadap variabel KK tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 karena belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana Gedung Kantor Pemda KBB sendiri termasuk belanja pada komputer dan barang-barang lainnya serta pengeluaran untuk tanah dengan mencicil untuk pembangunan gedung. Pengeluaran yang sangat meningkatkan keberhasilan keuangan daerah adalah prinsip utama.

Penemuan ini sejalan dengan teori dan penelitian Hariani & Febriyastuti (2020), yang menunjukkan implementasi belanja modal tidak berdampak besar terhadap keberhasilan keuangan dan itu artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa PAD, DANPER dan BM semuanya berkontribusi terhadap KK pemda yang menyatakan bahwa H4 diterima. Meskipun mereka mempengaruhi keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja mereka.

Menurut teori dan penelitian Prastiwi & Aji (2020), kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat secara signifikan ketika sumber pendapatan pemerintah daerah digabungkan dengan dana perimbangan dan belanja infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal semuanya bekerja sama untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Wahyudin & Hastuti (2020).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis bahwa pendapatan asli daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y), dana perimbangan (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang artinya dana perimbangan sangat penting dalam pengelolaan keuangan di Pemda KBB yang menjadikan kinerja keuangan juga semakin baik, dan belanja modal (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y). sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2) dan belanja modal (X3) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y).

Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan ukuran keuangan tambahan untuk menilai keberhasilan keuangan, seperti Rasio Saldo Pengeluaran, Rasio Kebebasan Finansial, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Untuk menentukan daerah mana yang sudah otonom dari pemerintah federal atau tidak, disarankan agar mengumpulkan sampel dari kabupaten dan kota lain. Selain itu, disarankan agar waktu pemantauan diperpanjang melebihi standar 8 tahun untuk mendapatkan temuan yang lebih menyeluruh.

Hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan informasi untuk Pemda KBB mengingat bahwa Pemda KBB adalah kabupaten yang baru berdiri maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus menyelidiki kemungkinan kekayaan alam di sana. Peningkatan sumber pendanaan yang ada mencakup peningkatan standar sumber daya manusia, peningkatan kelembagaan, pengkajian sumber-sumber prospektif daerah, peningkatan kerangka hukum atau peraturan daerah, dan peningkatan pengawasan. Ekstensifikasi memerlukan pencarian aliran pendapatan baru yang memiliki potensi signifikan, meminta pengelolaan sumber pendanaan dari pusat dan penerbitan peraturan daerah baru sesuai dengan sumbernya, sehingga memudahkan perizinan properti komersial seperti hotel, restoran, dan operator tur untuk meningkatkan pengguna retribusi sebagai pendapatan asli daerah, memikat investor dalam dan luar negeri untuk investasi daerah, dan mengutamakan pembangunan infrastruktur.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini baik dari segi waktu penelitian, biaya dan kurangnya variabel yang digunakan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3), 30–38.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja

- Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91.
- Arwati, D., & Ruth, M. (2015). *Fly Paper Effect Pada Unconditional Grants Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Penelitian pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Seminar Nasional Kewirausahaan & Inovasi Bisnis V Universitas Tarumanagara.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The Effect Of Regional Original Income And Balance Funding On Regional Government Financial Performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25–46.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29–40.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* (1st ed.). BPFPE.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Indonesia Ghalia.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The Effect Of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue, And Capital Expenditures On Efficiency Ratio Of Government Independence Performance. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1), 18–25.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8), 11–19.
- <http://djpk.kemenkeu.go.id/>. (2023). *Profil Kementrian Keuangan : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mtd, S. K., Batubara, M., & Rahmani, N. A. B. (2022). The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds, and Capital Expenditures on the Government's Financial Performance in The Regency/City of North Sumatra Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 22490–22500.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105.
- Sagbas, I., & Saruc, N. T. (2004). Intergovernmental Transfers And The Flypaper Effect In Turkey. *Turkish Studies*, 5(2), 79–92.
- Suambara, I. G. P. P., & Darmayanti, N. P. A. (2020). The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure On Regional Financial Performance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(6), 220–225.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Yuliansyah, R., Susanti, E. I., & Yanti, A. (2020). The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District

Governments in West Java Province in 2013-2017. *Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*, 152–156.

Biodata Penulis



Nova Rustiyani, Lahir di Bandung. Sedang menempuh pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Widyatama. Penulis dapat dihubungi melalui email : nova.rustiyani@widyatama.ac.id



Irene Sukma Lestari Barus, S.E., M.Si., Lahir di Medan. Menempuh Pendidikan S1 dan S2 di Universitas Sumatera Utara. Saat ini menjadi Dosen Tetap Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama. Penulis dapat dihubungi melalui email : irene.sukma@widyatama.ac.id